

**Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada  
Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara**

**Marno Wance<sup>1</sup>,**

**Bakri La Suhu<sup>2</sup>**

Universitas Pattimura

Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

Email:ipmummu@gmail.com,bakrilasuhu@yahoo.co.id

***Abstrac***

This study aims to find out the participation of first-time voters in determining political choices and to find out the behavior of first-time voters in determining the candidates for regional elections in North Maluku. This study uses descriptive qualitative which is can as a series of procedures used in solving problems investigated / examined by describing the state of the objects of research at time based on existing facts. Data sources used are primary data and secondary data, Data collection done through observation, interviews and documents analysis.

Based on the findings of the study, the level of political participation of first-time voters in determining their political choices in North Maluku regional head elections can be described; the voters are rational enough in deciding their political choices, because the indicators for chosing candidates are based on figures the and datas and the products of political issues sold by the candidatsin their qeetion programs. In addition it also turns out that the first time voters still use an emotional approach with the candidates in channeling voting rights in the elections.

***Keywords: Political Participation, First time Voters, Election***

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan yaitu untuk mengetahui partisipasi pemilih pemula dalam menentukan pilihan politik serta untuk mengetahui perilaku pemilih pemula dalam menentukan keputusan untuk memilih kandidat pada pemilihan kepala daerah di Maluku Utara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif yang bisa dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan dalam pemecahan masalah yang diselidiki/diteliti dengan menggambarkan keadaan obyek-obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumen.

Berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik pemilih pemula dalam menentukan pilihan politik pada pemilihan kepala daerah Maluku Utara yaitu sebagai berikut pemilih pemula sudah cukup rasional dalam memutuskan pilihan politiknya, karena yang menjadi indikator penilaian adalah ketokohan kandidat atau figur yang dimiliki oleh kandidat tertentu, serta produk isu-isu politik yang coba dijual berupa program-program kerja kandidat tertentu. di samping itu juga ternyata pemilih pemula masih menggunakan pendekatan emosional dengan kandidat dalam menyalurkan hak suara pada pemilihan.

***Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pemilih Pemula, Pilkada***

### A. PENDAHULUAN

Kategori politik kaum remaja dimaksudkan dalam pemilih pemula, mereka adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilih. Dengan hak pilih itu kaum remaja yang berusia 17 tahun atau sudah menikah ini akan mempunyai tanggung jawab kewarganegaraan yang sama dengan kaum dewasa yang lain. Dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara tahun 2013. Pemilih pemula yang kebanyakan dari siswa dan siswi sekolah menengah atas serta mahasiswa/mahasiswi yang baru memasuki usia hak pilih pastilah belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan ke mana mereka harus memilih. Sehingga terkadang apa yang mereka pilih tidak sesuai dengan yang di harapkan. Alasan inilah yang menyebabkan pemilih pemula sangat rawan untuk digarap dan didekati dengan pendekatan materi.

Kelempok pemilih pemula selalu ada dalam setiap periode pemilu maka hal itu menjadi pengalan pertama untuk terlibat secara langsung pada ranah politik

dalam bentuk penggunaan hak pilih saat pemilu, karena hak pilih merupakan hak dasar setiap warga negara yang diatur dalam konstitusi maka hak pilih merupakan amunisi strategis untuk merepresentasikan pilihan dalam pemilu. Dengan berbekal pengalaman pertama yang dimiliki oleh pemilih pemula maka tidak jarang kelompok ini memberikan prospek yang menjanjikan untuk dipengaruhi oleh kandidat tertentu guna mendulang suara lebih untuk memenangkan pemilu. Berbagai ajakan digunakan, sekedar menjadi simpatisan atau berpartisipasi secara aktif, bahkan sampai dalam bentuk yang paling ekstrim yakni intimidasi politik, apapun cara yang digunakan tujuan akhirnya adalah agar pemilih pemula bersedia menggunakan hak pilihnya dalam pemilu sesuai dengan kepentingan kelompok politik tersebut.

Pemilih pemula merupakan sasaran yang tepat dari partai politik dalam memperoleh suara, ini dikarenakan kurangnya pendidikan politik yang mereka dapatkan. Hal ini merupakan masalah karena mereka juga merupakan bagian dalam pesta demokrasi. Sehingga perlakuan pendidikan politik baik yang baik untuk diterapkan kepada pemilih pemula, yang akan membuat mereka tertarik sehingga mengerti bahwa mereka memiliki tanggung jawab yang sama seperti masyarakat dewasa yang lain, dengan begitu akan timbul sebuah pemikiran yang baik di balik niat memilih para pemilih pemula. Bahwa apapun hasil Pilgub akan berdampak juga bagi kehidupan mereka, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga lebih baik ikut berpartisipasi pada pesta politik lokal yang di gelar.

Pemilih pemula dalam kategori politik adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak politik, isi dan kualitas, norma-norma kewajiban politik seseorang. Orientasi politik yang dimiliki seseorang akan mendorong terjadinya partisipasi politik. Termasuk juga yang terjadi dengan orientasi politik pemilih pemula dalam pemilihan kepada daerah Maluku Utara 2013

Selama ini ada tiga faktor yang mempengaruhi untuk memilih atau tidak memilih dalam pemilu, yaitu *pertama*, identitas partai, dimana semakin solid dan

mapan suatu partai politik maka akan memperoleh dukungan yang mantap dari dari pendukungannya. Sebaliknya kondisi partai politik yang buruk akan mengakibatkan berkurangnya dukungan terhadap partai yang bersangkutan. Begitu pula dalam pilkada secara langsung dimana pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang di dukung oleh partai politik yang solid dan mapan akan mendapatkan dukungan dan simpatisan partai tersebut. *Kedua*, kemampuan partai dalam menjual isu kampanye. Partai yang hegemoni (*status qua*) biasanya menjual isu-isu kemampuan dan keberhasilan yang telah mereka raih. Partai-partai politik baru biasanya menjual isu-isu “menarik” dan partai politik tersebut, biasanya dianggap bersih“ terutama dari nuansa *money politics*. *Ketiga*, penampilan kandidat, dimana performa kandidat sangat menentukan keberhasilan kandidat..

Pemilih pemula merupakan pemilih yang masih awal dan belum memiliki kedekatan emosional baik secara ideologis, kedekatan nilai, budaya, agama, moralitas, norma, emosi, dan psikografis dengan salah satu kandidat yang bertarung pada pemilihan. Pemilih pemula saat ini memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi dalam menilai baik dan buruknya seorang kandidat. Untuk itu, pemilih pemula dengan kemampuan nalarnya akan menilai para kandidat yang bertarung pada pemilihan gubernur Maluku utara dan penilaian ini akan berpengaruh terhadap perilaku mereka dalam memutuskan memilih kandidat para Pemilihan Gubernur Maluku Utara.

Dari uraian persoalan inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka mengetahui secara pasti tentang kecenderungan pemilih pemula dalam memutuskan keputusan politik pada pemilihan gubernur Maluku Utara dan wakil gubernur Maluku Utara. Pemilihan ini merupakan salah satu kebanggaan tersendiri karena bagi masyarakat Maluku Utara yang telah telah menyalurkan amanah mereka melalui pemilu baik pada putaran pertama maupun pada putaran kedua. Untuk itu lebih lanjut dan hasil penelitian ini akan dituangkan dalam

artikel ilmiah tentang Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menentukan pada Pemilihan Kepala Daerah di Maluku Utara.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **a. Partisipasi Politik**

Partisipasi politik dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, dilihat sebagai suatu kegiatan partisipasi politik dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif mencakup usul mengenai kebijakan warga negara mengajukan usulan mengenai kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan saran dan kritik untuk mengoreksi kebijakan pemerintah. Sedangkan partisipasi pasif berupa kegiatan menaati peraturan/pemerintah menerima dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah.

Di gunakan teori partisipasi politik karena tingkat partisipasi pemilih merupakan salah satu faktor yang menentukan pemilu atau pilkada yang berlangsung berhasil atau tidak, semakin tinggi partisipasi pemilih, maka semakin tinggi tingkat keberhasilan pemilu atau pilkada semakin tinggi. Dalam analisis politik moderen partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik menfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin memengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum.

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini menjakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contracting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota

parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya.

Herbert McClosky mendefinisikan partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pengambil kebijakan umum (Budiarjo, 2008). Di negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, yang terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama kepentingan mereka akan tersalurkan atau sekurang-kurangnya diperhatikan.

Dalam nalar berfikir ini, tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan, tingginya partisipasi juga menunjukkan bahwa rezim yang berkuasa memiliki keabsahan yang tinggi. Partisipasi politik di suatu negara di anggap kurang berkualitas menunjukkan tidak ada perhatian masyarakat terhadap masalah politik, selain itu rendahnya partisipasi politik juga menunjukkan lemahnya legitimasi dari rezim yang berkuasa.

Partisipasi sebagai suatu bentuk kegiatan dibedakan atas dua bagian, yaitu:

1. Partisipasi aktif, yaitu kegiatan yang berorientasi pada output dan input politik. Yang termaksud dalam partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan yang di buat pemerintah. Mengajukan kritikan dalam perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar ajak dan memilih pemimpin pemerintahan.

2. Partisipasi pasif, yaitu kegiatan yang hanya berorientasi pada output dan input politik. Pada masyarakat yang termaksud kedalam jenis partisipasi ini hanya menuruti segala kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa mengajukan kritik dan usulan perbaikan (Subakti, 1999)

### **b. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung**

Pada tahun 2013, Rakyat Maluku Utara telah berhasil menyelenggarakan perhelatan akbar dalam kehidupan berdemokrasi yaitu pemilihan kepala daerah secara langsung. Meskipun ditemukan sejumlah masalah, namun tahapan demi tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Maluku Utara 2013 dapat dilalui dengan secara damai dan berkeadaban. Kekalahan diterima dengan lapang dada, dan kekecewaan kelompok tidak dilampiaskan dengan tindakan yang merugikan kepentingan Masyarakat secara secara keseluruhan.

Dipihnya sistem pilkada secara langsung mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri. Pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga mendimanisir kehidupan demokrasi di tingkat lokal. Keberhasilan pilkada langsung untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan rasionalitas rakyat sendiri (Joko, 2005)

Pemilihan kepala daerah (Pemilukada) sebagai instrumen demokrasi bagi kehidupan politik suatu daerah. Sistem pemilukada langsung juga merupakan sebuah pembaharuan yang mempunyai arti cukup penting dalam proses konsolidasi demokrasi di arus lokal. Secara normatif, pelaksanaan Pemilukada langsung menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman dan perluasan demokrasi lokal. Setelah lebih dari 32 tahun kebebasan dalam menyampaikan pendapat dibatasi, munculnya peraturan pemerintah mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung ini merupakan angin segar dalam proses bernegara.

Terdapat beberapa keunggulan yang muncul dengan adanya sistem pemilihan kepala daerah secara langsung ini antara lain:

1. Sistem demokrasi langsung melalui pemilukada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik tingkat lokal dibandingkan sistem demokrasi perwakilan yang lebih banyak meletakkan kuasa untuk menentukan rekrutmen politik di tangan wakil rakyat dalam hal ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Dari sisi kompetisi politik, pemilihan kepala daerah secara langsung memungkinkan munculnya secara lebih lebar preferensi kandidat-kandidat yang bersaing serta memungkinkan masing-masing kandidat berkompetisi dalam ruang yang lebih terbuka dibandingkan ketertutupan yang sering terjadi dalam demokrasi perwakilan.
3. Sistem pemilihan langsung akan memberi peluang bagi warga untuk mengaktualisasikan hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elit politik, seperti yang kasat mata muncul dalam sistem demokrasi perwakilan. Setidaknya dengan sistem demokrasi langsung, warga di arus lokal akan mendapat kesempatan untuk memperoleh semacam pendidikan politik, traning kepemimpinan politik sekaligus mempunyai posisi yang setara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik.
4. Pemilukada langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan figur pemimpin yang aspiratif, kompeten, dan mempunyai legitimasi, hal ini dikarenakan dengan adanya pemilihan secara langsung oleh masyarakat, maka kepala daerah mempunyai orientasi tanggung jawab atas kinerja yang dilakukan kepada seluruh masyarakat bukan hanya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat.
5. Kepala daerah yang terpilih melalui pemilukada langsung akan memiliki legitimasi politik yang kuat sehingga akan terbangun perimbangan



kekuatan (*check and balances*) di daerah, anatar kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Daerah.

c. **Perilaku Pemilih Pemula**

Isu-isu dan kebijakan politik sangat menentukan perilaku pemilih, namun terdapat faktor-faktor lain yang juga berpengaruh. Para pemilih dapat saja memilih seorang calon baik calon kepala daerah maupun calon anggota dewan, karena di anggap sebagai representatif dari keagamaan. Namun dapat juga ia memilih karena ikatan kepartaian dan juga mewakili kelompoknya. Atau ada juga pemilih yang memilih calon karena ikatan emosional misalnya taat dan kepatuhan terhadap seorang dengan ikatan loyalitas terhadap figur bersangkutan.

Perbincang mengenai perilaku sangat berhubungan dengan soal dan tindakan seorang dalam melakukan tindakan tertentu. Engel menyatakan, sikap adalah keseluruhan evaluasi konsumen dalam intensitas kekuatan dan dukungan, sehingga menjadi sebuah kepercayaan bagi seseorang yang memegang sikap tertentu. Sementara yang lainnya mungkin dengan keyakinan kuat, sementara yang lainnya mungkin dengan keyakinan yang minimum. Walaupun intensitas dan kepercayaan saling berhubungan, tetapi keduanya tidak sama (Ali, 2013)

Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan politik, diperlukan dalam rangka calon dalam menyusun strategi pemasaran dirinya atau juga programnya. Informasi mengenai berbagai variabel tersebut jelas berguna dalam menyusun strategi komunikasi, manajemen kandidat, penyusunan isu serta kebijakan yang akan ditawarkan kepada para pemilih. Efektivitas dan efisiensi penyampaian pesan-pesan politik tersebut sangat tergantung pada pemahaman si calon tentang perilaku pemilih di daerah yang akan diwakili atau dipimpinya. Ini jelas bahwa akan membuat strategi misalnya siapa, apa dan bagaimana menarik massa akan ditentukan oleh perilaku pemilih. Singkatnya, perilaku pemilih dimana masyarakat yang akan di wakili atau akan memimpin menjadi informasi penting dalam merencanakan kampanye dan alokasi sumber daya yang dimiliki seseorang.

Sedangkan menurut Gaffar pengertian perilaku memilih adalah keputusan seseorang dalam memberikan suara kepada kandidat tertentu. Hal ini terjadi baik dalam pemilihan legislatif maupun eksekutif. Terdapat dua pendekatan untuk menganalisis perilaku pemilih: pendekatan sosiologis (dikenal pula dengan Manzhap Colombia) dan pendekatan Psikologis (Mazhab Michigan) (Ali, 2013)

#### **d. Tipologi Pemilih**

Para pemilih pemula yang memiliki karakteristik rasional dalam memilih adalah mereka yang lebih mempertimbangkan argumen-argumen yang diajukan oleh partai atau kandidat. Kesesuaian argumen dengan norma-norma yang dimiliki oleh pemilih biasanya menjadi kaidah dasar dalam menentukan putusan. Setiap pemilih tentunya memiliki alasan atau preferensi yang berbeda-beda, sehingga tidak ada batasan tentang rasionalitas. Schiffman dan Kanuk mengungkapkan bahwa perilaku konsumen secara teliti mempertimbangkan semua alternatif. Baru kemudian ia menjatuhkan pilihan kepada mereka. Sementara pemilih jenis lain (irasional) lebih berorientasi pada kedekatan sosial, asal-usul, paham dan agama (Ali, 2013)

Menurut Key, yang menentukan pilihan rasional para pemilih adalah sejauh mana kinerja pemerintah, partai, atau wakil-wakil mereka baik bagi dirinya sendiri atau bagi negaranya, atau justru sebaliknya penilaian seperti ini Key disebut dengan pilihan secara *restropektif*. Apabila penilaian pemilih positif terhadap kinerja pemerintah, partai, atau wakil yang sedang berkuasa. Maka mereka akan dipilih kembali (1968:61 dalam Roth, 2008:48). Sedang menurut Dows (1968:26. Dalam, Roth, 2008:49), dalam deskripsinya mengenai *homo economicus*, mengatakan bahwa pemilih rasional hanya menuruti kepentingannya sendiri di atas kepentingan orang lain (*self-interests axiom*). Jika ini diterapkan dalam perilaku pemilih, maka pemilih yang rasional akan memilih calon yang paling menjanjikan keuntungan bagi dirinya. Jadi, pemilih tidak terusik oleh konsep politik sang calon (*utility maximization*). Dimana untuk mencapai

kebutuhan maksimal mengenai kegiatan pencalonan pada masa lalu dan apa yang mungkin dilakukan pada masa mendatang. (Dalam, Aspirasi. Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 2 Nomor, Agustus 2013, Halaman: 4).

#### **e. Ketokohan Seseorang**

Firmanzah mengungkapkan kemampuan dan kapasitas orang atau kandidat merupakan faktor yang menentukan bagi masyarakat dalam memilih partai politik atau kandidat. Hal yang sama seperti yang diungkapkan oleh Fuholin *candidate credibility* merupakan salah satu faktor penting dalam *political campaign*. Karp berpendapat partai politik sangat penting, karena dapat memberikan gambaran dan petunjuk singkat tentang kualitas partainya (Ali, 2013). Mayoritas pemilih dalam pemilihan lebih melihat siapa yang memimpin partai di bandingkan dengan nama partai politik. Pembangunan organisasi partai yang solid tidak terlalu di perlukan karena partai-partai politik mempunyai kemampuan untuk memanupilasi sentimen pemilih melalui pemimpin karismatik. Untuk itu, kepemimpinan atau ketokohan seseorang dalam partai politik tertentu memengaruhi sikap terhadap tokoh partai dalam menentukan keputusan memilih.

#### **f. Hubungan Emosional**

Mayoritas pemilih di Indonesia sering melihat dari mana asal kandidat atau pemimpin partai itu berasal. Masyarakat pemilih Indonesia cenderung memilih kandidat atau partai politik yang mempunyai kedekatan dalam hal agama, organisasi, dan suku. Kedekatan agama seperti yang dilakukan oleh oleh Partai Demokrasi Sejahtera (PDS) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kedekatan organisasi seperti yang di perhatikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki induk organisasi Nadlatul Ulama (NU), sedangkan kedekatan suku seperti yang di contohkan dalam Partai Bulan Bintang (PBB) yang memiliki kedekatan daerah asal dari pimpinannya. Selanjutnya kedekatan ideologi seperti yang dijalankan oleh Partai Marhaenisme yang mengemban ideologi soekarnoisme.

Atas konsep tersebut, maka terdapat keeratan hubungan antara pemilih dengan tokoh partai yang berperan pada partai politik. Keeratan ini akan mempengaruhi sikap seseorang dalam memilih partai politi. Keeratan hubungan tersebut dapat diukur berdasarkan indikator-indikataor yaitu agama, organisasi, ideologi, dan suku.

#### ***g. Platform***

Menurut Karp, *Platform* merupakan program kerja yang hendak dicapai yang disusun berdasarkan isu-isu politik yang paling mendasar dan diperlukan masyarakat pemilih. Isu-isu tersebut biasanya lebih dekat pada aspek sosial seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Kemampuan tokoh politik dan partainya mengangkat isu-isu paling mendasar ini di perlukan oleh masyarakat pemilih (Ali, 2013). Bagi pemilih yang menilai partai politik atau seseorang kontestan dari kacamata '*policy-problem-solving*', hal ini terpenting bagi mereka adalah sejauh mana para kontestan mampu menawarkan program kerja atau solusi atas permasalahan yang ada. Kelompok pemilih ini akan cenderung memilih secara objektif partai politik atau kontestan yang memiliki kepekaan dengan masalah nasional dan memiliki kejelasan program kerja. Dalam pelaksanaan rekrutmen politik calon anggota legislatif baik tingkat pusat maupun kabupaten/kota perlu lebih memperhatikan proses mekanismennya, sehingga tahapan-tahapan rekrutmen politik anggota DPR, DPRD sesuai dengan Juklak yang telah ditetapkan DPP. Proses rekrutmen calon anggota legislatif harus benar-benar sesuai dengan keinginan partai dan masyarakat, dan calon anggota legislatif harus dikenal masyarakat dan memiliki kualitas dan kapasitas jikalau menjadi anggota DPR dan DPRD. Dalam proses rekrutmen ini, DPD Partai Golkar Kab. Halmahera Barat juga melakukan survey terhadap para Calon Anggota Legislatif Periode 2014-2019. (Kaunar & Wance, 2017)

Dari hasil penelitian ini ditemukan secara signifikan bahwa perilaku pemilih pemula dalam memutuskan pilihan politik pada pemilihan Gubernur dan wakil

Gubernur Maluku Utara tahun 2013, bahwa faktor ketokohan seseorang dapat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap tokoh kandidat dalam menentukan keputusan memilih terhadap kandidat calon tertentu. Di bandingkan dengan empat faktor lainnya, ketokohan merupakan faktor yang memiliki pengaruh sangat dominan. Dari hasil penelitian ini juga ditemukan, aspek-aspek yang melekat pada faktor ketokohan yaitu kredibilitas, kemampuan dan kepribadian yang mempunyai peranan sangat penting dalam membentuk sikap pemilih terhadap tokoh partai tertentu. (Wance, 2018) Sedangkan Hasil penelitian di Pilkada Halmahera Selatan 2015 bahwa Proses pemilihan dari sekian tahapan sudah bisa disebut berjalan efektif. Tetapi perlu dibenahi khususnya pada tahapan rekapitulasi suara hasil pemilihan yang masih menimbulkan rasa ketidakadilan dari sebagian pasangan calon pasangan calon. (M, Wance, & Taib, 2017)

#### **h. Teori Ideologi**

Firmanzah mengemukakan bahwa ideologi melingkupi semua sistem nilai, keyakinan, simbol, mitos, ritual, dan jargon yang terdapat dalam struktur sosial masyarakat. Di dalam dunia politik, hubungan antara ideologi dan politik adalah tak terpisahkan. Ideologi yang dimiliki oleh suatu partai akan mempengaruhi sikap seseorang terhadap partai tersebut serta berpengaruh pula kepada keputusan pemilih partai politik. Firmanzah juga mengemukakan bahwa ideologi merupakan faktor yang lebih penting menekan aspek afektif dan emosi dalam keputusan memilih partai politik. (Ali, 2013). Untuk mengukur sebuah ideologi yang dipegang teguh oleh seseorang dapat diukur berdasarkan sistem nilai, keyakinan, simbol, mitos, ritual, dan jargon. Dengan demikian keterkaitan ideologi suatu partai terhadap pemilih akan mempengaruhi sikap seseorang terhadap partai dalam menentukan keputusan pemilihnya dalam memilih kandidat yang di usung oleh partai tertentu.

## C. METODE PENELITIAN

### a. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif yang bisa dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan dalam pemecahan masalah yang diselidiki/diteliti dengan menggambarkan keadaan obyek-obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Penelitian deskriptif kualitatif yakni sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Yang diarahkan untuk menjelaskan hal-hal atau masalah yang terjadi dan digambarkan sesuai dengan fokus masalah penelitian (Lexy J. Moleong, 2001:3).

### b. Sumber Data

Data primer adalah data yang diambil dari hasil wawancara dengan berbagai informan seperti; (1) SMA 08 Kota Ternate, (2) Pemilih Pemula di Kelurahan Kalumpang, (3) Pemilih Pemula di Kelurahan Muhajirin. Sedangkan, data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh berdasarkan hasil penelusuran aturan-aturan mengenai pemilihan kepala daerah, buku-buku pendukung, jurnal, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian

### c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian, tidak lepas dari proses pengumpulan data yang ada di lapangan. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni (1) Tahap observasi, (2) Tahap wawancara, dan (3) Tahap dokumentasi.

### d. Teknik Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan secara sistematis sesuai kebutuhan penelitian, maka penulis dapat mengorganisasikan data, agar dapat memilah-milah dan di analisa sesuai pola yang di terapkan dalam metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam menganalisa data peneliti menggunakan *tiga* (3) tahapan yaitu (1) Tahap Memilih Data/Reduksi data, (2) Penyajian data/Display data, dan (3) Kesimpulan/Verifikasi data.

#### D. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan fokus penelitian yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini akan di sajikan hasil penelitian melalui wawancara yang penulis lakukan secara langsung dengan informen yang telah dipilih di wilayah Kecamatan Ternate Tengah. Pada bagian ini adalah merupakan bagian yang sangat menentukan dalam penulisan skripsi karena bagian inilah yang akan menganalisis dan membahas data-data atau hasil suatu penelitian maupun temuan-temuan di lapangan. Data-data yang diperoleh harus sesuai dengan variabel penelitian dan sebab-sebab dari gejala yang berhubungan dengan variabel dimaksud.

Untuk itu pada bagian ini variabel yang akan dianalisis atau diteliti adalah bagaimana mengetahui perilaku pemilih pemula dalam memberikan hak politik pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. sebagaimana penulis uraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa pemilu pemula merupakan pemilih yang pertama kali menggunakan hak pilih pada pemilihan sehingga mereka sangat dilematis dalam menentukan pilihan politiknya.

Pemilih pemula sendiri adalah golongan penduduk yang berusia 17 sampai dengan 21 tahun yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan. Disamping itu pemilu pemula yang sebagian besar masih berstatus pelajar dan mahasiswa sudah lama menjadi incaran partai-partai politik dalam setiap ajang pemilihan kepala daerah, hal ini dikarenakan potensi kalangan pemilih pemula sebagai aktor penentu kemenangan sangat besar. Alasan mengapa pemilih pemula merupakan potensi strategis bagi kemenangan partai politik karena secara kualitatif, kelompok pemilih pemula relatif meningkat. Alhasil, para kandidat calon bersaing untuk merebut suara dari pemilih pemula dengan melakukan berbagai macam cara, baik itu dengan cara yang positif maupun cara-cara negatif, karena apa yang dilakukan kandidat tersebut adalah esensi dari politik yaitu untuk memperoleh kekuasaan.

Begitu besarnya potensi pemilih pemula ini haruslah mendapat perhatian khusus sehingga tidak hanya dimanfaatkan oleh oleh kandidat tertentu. salah satu

pemanfaatan pemilih pemula adalah pada saat kampanye mereka kerap sekali hanya dimobilisasi oleh kandidat calon untuk mengikuti kampanye. Artinya meski berpartisipasi pada saat kampanye, namun sebenarnya mereka tidak memiliki kepedulian terhadap pemilu namun sekedar ikut-ikutan karena ada konformitas dengan teman mereka saja.

Adanya eksploitasi politik yang tidak didukung dengan pendidikan politik secara benar membuat kebanyakan dari pemilih pemula tidak bisa secara bebas menggunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani atau murni pilihan mereka sendiri. Pemilih pemula hanya menjadi objek yang digunakan untuk memperoleh kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu, dimana sebagai pemilih pemula mereka ibarat kertas putih yang dapat ditulis oleh siapapun dan dengan tulisan apapun. Hal ini dikarenakan pilihan politik mereka belum dipengaruhi motivasi tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik lokal. Pemilih pemula yang masih belum memiliki pengalaman memilih memang sangat mudah untuk dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya, mulai dari lingkungan keluarga, teman sebaya, maupun dari partai politik itu sendiri. Kebanyakan dari mereka memang benar-benar belum mengerti politik, sehingga lingkunganlah yang kemudian membentuk mereka. Pemilih pemula yang tergolong dalam kategori usia remaja juga menjadi sangat signifikan bagi para kandidat calon, karena kategori usia remaja ini secara psikologis sangat mudah untuk dipengaruhi dan diarahkan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan uraian singkat di atas dengan realitas yang terjadi di lapangan dan data-data yang diperoleh ternyata faktor ketokohan yang sangat besar mempengaruhi pilihan politik pemilih pemula, karena faktor pengalaman dan karismatik menjadi prioritas utama pemilih tertentu. Sebenarnya hak politik para pemilih yang disalurkan pada saat pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Menurut penulis banyak problem yang ditemukan di lapangan para pemilih pemula belum memahami jelas tentang penting hak politik setiap warga negara yang akan disalurkan pada hajatan-hajatan dan momentum-momentum pemilihan kepala daerah. Ha ini menjadi pertanyaan



yang muncul di benak penulis bahwa: apakah pemilih pemula dalam memberikan hak politik (hak suara) pada pemilihan gubernur maluku utara dalam memilih salah satu kandidat calon karena figur atau ketokohan yang dimiliki oleh kandidat calon atautkah visi dan misi calon tertentu? atautkah karena ada hubungan emosional dengan kandidat tertentu atautkah karena janji-janji politik yang yang kemudian itu akan direalisasikan kelak apabila menang pada pemilihan nanti.

#### a. Aspek Pendekatan ketokohan

Tokoh yang di nilai oleh masyarakat memiliki kemampuan yang memadai dan didukung dengan kepribadian yang baik akan memunculkan sikap positif bagi pemilih pemula. Dukungan itu pada gilirannya juga mendorong pemilih pemula secara suka rela merekomendasikan kandidat tertentu yang dinilai kredibel dan bahkan mengampanyekan program-programnya. Ketokohan secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap sikap partai politik untuk mengusung kandidat calon untuk bertarung di setiap level pemilihan umum.karena figur-figur atau tokoh yang ada dalam sebuah partai politik menjadi kekuatan dan sekaligus magnet. Ia mampu menjadi daya tarik yang sangat efektif bagi masyarakat secara luas. Dalam sejarah kepartaian di Indonesia setiap partai politik senantiasa mencari figur yang diyakini dapat mengoptimalkan dukungan masyarakat terhadap kandidat calon yang di usung untuk memenangkan setiap ajang pemilihan umum.

Sehubungan dengan itu, untuk menjawab masalah di atas, bagaimana mengetahui tentang perilaku pemilih pemula dalam menentukan pilihan politik pada pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2013, di kecamatan ternate tengah maka peneliti akan menguraikan kutipan hasil wawancara yang di peroleh dengan salah satu sisiwi SMA Negeri 08 Kota Ternate kelas XII IPA <sup>2</sup> Yaitu Siswi **Febriani Hasan Silia** sebagai berikut:

*“pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara 2013 ini, dari beberapa jalan kandidat yang masuk putaran pertama, saya lebih memilih Syamsir Andili dan Beny Laos dengan alasan bahwa pengalaman kepemimpinan beliau pernah menjabat walikota Ternate dan menurut saya selama masa kepemimpinan beliau sangat berhasil membawa kota ternate*

*dengan pembangunannya sangat berkembang pesat seperti yang bisa kita lihat sekarang ini. Karena pada putaran kedua, dari dua kandidat antara Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Doa dan Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Saya lebih memilih Abdul Gani Kasuba karena Pa Syamsir Andili Mendukung beliau maka saya pun harus memilih, selain itu, saya juga putra daerah yang berasal dari sanana, maka saya pun tahu bagaimana kepemimpinan Ahmad Hidayat Mus di sanana, selama masa kepemimpinan beliau selama menjabat bupati tidak ada perubahan pembangunan, bahkan infrastruktur jalan yang rusak. Sehingga lebih baik saya memilih satu calon selain beliau di putaran kedua ini ”(Hasil Wawancara, 16 Desember 2013, Pukul: 18:35 Wit)*

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas kecenderungan perilaku pemilih pemula pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku utara 2013 yang menjadi faktor utama yaitu pengalaman kandidat dalam memimpin pemerintahan, dan sudah terbukti kinerja-kinerja pada saat menjabat sebagai sebagai kepala daerah, dan pemimpin di masa mendatang itu harus memiliki Track record yang mampu. Selain itu, pemilih pemula dalam menentukan pilihan politik ada, pemilih masih percaya kepada kandidat yang sebelumnya dalam memilih kandidat pada putaran kedua. dalam memutuskan keputusan politik pemilih pemula yang menjadi daya tarik tersendiri yaitu ketokohan seorang kandidat yang dicirikan dengan kepribadian yang baik. Dari gambaran di atas menunjukkan indikasi yang kuat bahwa pemilih pemula masih melihat seorang kandidat berdasarkan ketokohan seorang kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2013 untuk memutuskan keputusan politiknya.

Hal yang sama juga yang di sampaikan pada salah warga masyarakat kelurahan kampung pisang, RT 03/ RW 06, dalam memberikan hak politiknya pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara tahun 2013 lebih khusus di Kecamatan Ternate Tengan yaitu **Saudara Rizal** adapun kutipan penyampaian dalam wawancara seperti berikut ini:

*“jujur berbicara mengenai tentang pilihan politik saya pada pemilihan gubernur Maluku Utara tahun 2013 pada putaran pertama saya lebih memilih Syamsir Andili dan Beny Laos dengan pertimbangan bahwa beliau ini merupakan mantan Walikota Ternate yang mempunyai pengalaman dalam memimpin pemerintahan. Selain itu, masa kepemimpinan beliau menjabat selama dua periode sangat bersih dari kasus-kasus yang merugikan negara dan daerah ini, sedangkan wakilnya walaupun beliau belum mempunyai pengalaman duduk dalam lingkungan birokrasi namun beliau sangat sukses dalam dunia bisnis. Sedangkan pada putaran kedua karena syamsir andili dan Beny Laos tidak masuk pada putaran kedua, maka saya harus beralih perhatian dalam menentukan pilihan politik. Pada putaran kedua di antara kedua calon kandidat saya lebih memilih Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir karena pertimbangan bahwa beliau juga mempunyai pengalaman dalam memimpin pemerintahan karena beliau pernah menjadi wakil Gubernur pada periode yang lalu. Selain itu, beliau ini merupakan salah tokoh agama yang sering kali melakukan siraman rohani di masjid-masjid yang ada di Maluku Utara, oleh sebab itu, saya secara pribadi yakin bahwa setelah beliau terpilih secara moralitas diri sangat tercaya.”(Hasil Wawancara, 29 Desember 2013, Pukul: 10:34 Wit).*

Berdasarkan pada hasil kutipan wawancara di atas menggambarkan bahwa kenyataan pemilih sudah cukup rasional dalam menentukan hak politiknya pada pemilihan Gubernur Maluku Utara tahun 2013, dalam memilih pemimpin di daerah ini. Pemilih dalam menentukan pilihan politiknya sangat rasional dan cerdas karena berdasarkan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif yaitu sesuai dengan pengalaman dan perilaku si calon selama menjabat di Institusi lembaga negara. Sehingga ketokohan dan figur yang dimiliki oleh kandidat tersebut merupakan salah satu daya tarik tersendiri oleh pemilih dalam menentukan pilihan politiknya. Maka dengan itu, menandakan bahwa performen seorang kandidat dan ketokohan yang dimiliki merupakan salah satu kekuatan

dalam diri setiap kandidat dalam percaturan politik pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2013 ini. Dengan faktor-faktor itulah dapat menarik rasangan tersendiri bagi pemilih pemula sehingga dengan sendirinya pemilih merasa simpati dan terlena oleh ketokohan dan pengalaman yang dimiliki oleh kandidat tertentu dan sudah tentu pilihan politiknya akan dapat di agregasikan pada pencoblosan pada saat pemilihan Gubernur Maluku Utara tahun 2013, baik pada putaran pertama maupun putaran kedua.

#### **b. Aspek Hubungan Emosional**

Hubungan emosional merupakan ikatan psikologis antara-dua individu. Hubungan emosional tersebut dapat dilandasi oleh banyak faktor, seperti faktor agama, ideologi, ras, suku bangsa, dan cita-cita yang sama. Faktor-faktor itulah yang pada umumnya menimbulkan kedekatan secara emosional sehingga menimbulkan kedekatan secara emosional dengan kandidat calon tertentu, adanya kedekatan emosional dengan kandidat-kandidat calon tertentu. sehingga dengan adanya kedekatan secara emosional akan mendorong seseorang untuk bersikap positif pada kandidat calon tertentu. kemudian dengan sendirinya akan memberikan dukungan konkret dengan memilih kandidat calon tertentu.

Pengaruh tersebut dapat terjadi karena dengan adanya kedekatan emosional, maka pemilih pemula memiliki kepercayaan yang tinggi bahwa aspirasi-aspirasinya akan banyak ditanggapi jika kandidatnya terpilih. Pemilih pemula meyakini bahwa kandidat-kandidat yang dekat secara emosional yang dinilai responsif dan dapat memahami aspirasi-aspirasinya dengan baik. Keyakinan-keyakinan itulah yang dapat mengarahkan dan mendorong sikap serta keputusan pemilih pemula dalam memilih kandidat calon.

Dari beberapa hasil wawancara yang di lakukan ada beberapa pernyataan informen yang sama dalam menentukan pilihan politik pada pemilihan gubernur Maluku Utara 2013 di Kecamatan Ternate Tengah di antaranya **Mahasin**

**Amaliyah**, Siswa SMA Negeri 08 Kota Ternate Kelas XII IPA<sup>2</sup>, menyatakan sebagai berikut:

*“Mengapa sehingga pada pemilihan gubernur Maluku Utara 2013 putaran pertama kemarin, jujur saja saya memilih Muhajir Albar dan Sahrin Hamid karena yang menjadi alasan bahwa saya memiliki hubungan kekeluargaan dengan pa Muhajir Albar itu dari mama, dan saya sudah kenal beliau karena seringkali saya pegi dia pa rumah. Selain itu pada saat debat calon gubernur Maluku Utara 2013 saya melihat beliau mempunyai Visi/misi yang bagus yaitu mau membentuk lembaga bantuan hukum bagi masyarakat, dan kemampuan kecakapan dalam berbicara. Sedangkan pada putaran kedua saya lebih memilih Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir dari pada Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Doa, Karena dengar-dengar dari teman saya bahwa Ahmad Hidayat Mus itu jadi tersangka kasus Korupsi di sanana, kemudian masalah pembangunan infrastruktur bandara yang masih bermasalah, dan jalan-jalan di sanana banyak yang rusak, masih jadi Bupati saja sudah banyak masalah apalagi mau jadi gubernur”*(Hasil Wawancara, 16 Desember 2013, Pukul:10:23 Wit)

Dari hasil wawancara diatas menginformasikan bahwa perilaku pemilih pemula dalam menentukan pilihan politik pada saat pemilihan gubernur Maluku Utara 2013 lebih khususnya di kecamatan ternate tengah, pemilih pemula tidak memandang calon itu berasal dari partai yang mana dan visi/misi yang di tawarkan tetapi pemilih pemula lebih memilih kandidat karena dilihat dari faktor keluarga dan tidak melihat faktor yang lain, sehingga pilihan politiknya selalu mengedepankan nilai-nilai keluarga yang dimiliki. Selain itu, pemilih pemula dalam menentukan pilihan politiknya faktor ketokohan mempengaruhi secara signifikan mempengaruhi sikap pemilih dalam menentukan pilihan politik pada pemilihan gubernur Maluku Utara 2013. Dari data hasil wawancara diperoleh dapat dilihat bahwa terdapat pengalihan suara dari kandidat yang satu ke kandidat yang lain di sebabkan pemilih pemula mendengar isu-isu yang berkembang bahwa

dari dua kandidat yang bertarung pada putaran kedua terdapat masalah pada saat dia memimpin pemerintahan sehingga pemilih lebih cenderung memilih sosok pemimpin dari kalangan Agama.

### c. Aspek Platform Kandidat

Di tengah perkembangan masyarakat yang semakin rasional dalam memilih seorang kandidat, maka faktor program memiliki peranan yang sangat penting. Pemilih pemula yang rasional pada umumnya akan cenderung meninggalkan aspek-aspek seperti agama, suku, dan faktor-faktor lain yang dianggap kurang berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah ini. Namun pemilih pemula yang rasional akan cenderung melihat visi dan misi yang akan diwujudkan ketika seorang kandidat memimpin pemerintahan. Visi dan misi itu umumnya tergambar dalam program atau *platform* kandidat yang terus menerus dipromosikan ketika melakukan kampanye. Oleh sebab itu, bagi pemilih pemula yang rasional akan cenderung menganalisis program-program kandidat dalam menentukan pilihannya. Kandidat calon yang memiliki program sesuai dengan harapan dan kondisi masyarakat akan menjadi kandidat pilihan.

Selanjutnya untuk lebih jauh lagi mengetahui perilaku pemilih pemula dalam menentukan pilihan politik dalam memberikan hak politik pada pemilihan gubernur Maluku Utara tahun 2013 di Kecamatan Ternate Tengah berikut ini kutipan hasil wawancara dengan salah satu siswa SMA Islam Ternate, kelas IPS yaitu **Siswa Admin Man** adalah sebagai berikut:

*“Berbicara mengenai pemilihan gubernur Maluku Utara tahun 2013 ini, yang menjadi pertimbangan saya untuk memilih kandidat calon pada putaran pertama maupun putaran kedua yaitu faktor pengalaman calon, dan Visi/misi pasangan calon misalnya kalau beliau terpilih beliau akan mengusahakan pendidikan gratis, dan listrik gratis sehingga saya lebih memilih Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Doa”*(Hasil Wawancara, 19 Desember 2013, Pukul:08:11 Wit)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemilih pemula ternyata menyalurkan hak politik pada salah satu kandidat pada pemilihan Gubernur Maluku Utara tahun 2013, ternyata pemilih lebih menggunakan pendekatan Pengalaman kandidat selama menjabat di Institusi pemerintahan. Selain itu ada faktor lain sehingga pemilih menggunakan hak pilihnya yaitu Visi/misi yang di usung oleh kandidat yang sangat bersentuhan langsung dengan kondisi masyarakat. Ada beberapa Informen yang memberikan Informasi keterkaitan dengan penelitian yang di teliti yaitu bagaimana perilaku pemilih pemula dalam menentukan pilihan politiknya pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2013, lebih khususnya di Kecamatan Ternate Tengah, ternyata bahwa dari hasil wawancara dengan informen ada dua pernyataan yang sama yaitu faktor dorongan dari keluarga sehingga pemilih menentukan pilihan politiknya.

Dari hasil pernyataan di atas telah menggambarkan bahwa pemilih pada pemilihan gubernur maluku utara tahun 2013 masih menggunakan pendekatan *platform* kandidat dalam menentukan pilihan politik dan isu-isu politik yang paling mendasarkan dan bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat yang sengaja di usung oleh pasangan tertentu untuk menarik perhatian pemilih. Sehingga dalam pilihan politiknya tidak memandang kandidat calon berasal dari manapun dan agama yang jelas seorang pemilih lebih memilih seseorang kandidat calon dilihat berdasarkan faktor isu-isu politik yang menjadi salah satu pertimbangan. Selain itu, pemilih memilih kandidat calon berdasarkan suatu visi misi yang di usung oleh calon Gubernur dan wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2013.

## E. KESIMPULAN

1. Dari hasil penelitian ini ditemukan secara signifikan bahwa perilaku pemilih pemula dalam memutuskan pilihan politik pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2013, bahwa faktor ketokohan seseorang dapat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap tokoh kandidat dalam menentukan keputusan memilih terhadap kandidat calon tertentu. di bandingkan dengan empat faktor lainnya, ketokohan

merupakan faktor yang memiliki pengaruh sangat dominan. Dari hasil penelitian ini juga ditemukan, aspek-aspek yang melekat pada faktor ketokohan yaitu kredibilitas, kemampuan dan kepribadian yang mempunyai peranan sangat penting dalam membentuk sikap pemilih terhadap tokoh partai tertentu.

2. Hasil penelitian ini juga menggambarkan, Program-program yang di tawarkan oleh kandidat calon seperti menyangkut Pendidikan, Kesehatan, kemiskinan, pelayanan hukum, dan isu-isu yang lain yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Pada konteks ini pemilih pemula sudah cukup rasional untuk menentukan pilihan politiknya. Pemilih dalam kategori ini sudah tidak akan cenderung memilih kandidat berdasarkan pada aspek-aspek seperti pendekatan agama, suku, tetapi pemilih yang rasional akan cenderung menganalisis program-program yang ditawarkan dan dipromosikan secara terus menerus pada saat kampanye.
3. Hubungan emosional juga mempengaruhi sikap pemilih pemula terhadap kandidat tertentu dalam menentukan keputusan memilih kandidat calon. Dari gambaran di atas bahwa ada suatu indikator pemaksaan terhadap pemilih pemula sehingga atas dasar inilah kemudian pemilih dapat memutuskan keputusan politik atas kehendak dari keluarga. Dan kebanyakan dalam kategori ini pemilih pemula sangat dilematis dan belum mempunyai gambaran tentang karakteristik tipikal pemimpin yang ideal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2013). *Pemasaran Politik di Era Multiparti*. Jakarta: PT Mirzani.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Joko, J. P. (2005). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Kaunar, A., & Wance, M. (2017). Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Studi Di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Halmahera Barat). *Journal Ilmu Pemerintahan, Unsyiah* , 56-71.
- M, Z. K., Wance, M., & Taib, J. (2017). INTEGRITAS KPU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TERHADAP PELAKSANAAN PILKADA TAHUN 2015. *Jurnal Kawasa* , 56-64.
- Subakti, R. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grafindo.
- Wance, M. (2018). Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara 2013. *Jurnal Kawasa* , 32-41.
- (Dalam Aspirasi, jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013).  
Integralistik No.1/Th. XXII/2011, Januari-Juni 2011  
Badan Pusat Statistik Kota Ternate Tahun 2013  
Undang-undang 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah  
Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik  
PP No 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
Undang-Undang No 10 Tahun 2008 Tentang Pemelihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  
Undang-Undang No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum  
Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik